

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat

Laudy Fahzura¹, Najamudin²

^{1,2}Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: February 00, 00
Revised: March 00, 00
Accepted: March 00, 00
Available online: April 00, 00

KEYWORDS

Implementation, Local Government Information Systems, Regional Development Planning Documents

CORRESPONDENCE

Phone: +6285361112728
E-mail: laudyfahzura2507@gmail.com

A B S T R A C T

The Regional Government Information System was built to facilitate the delivery of local government information to the public and was developed to produce interconnected and integrated electronic-based local government information services. This study aims to determine the extent of the application of the Regional Government Information System application at the Library and Archives Service of West Aceh Regency. This study uses qualitative methods, namely by collecting observation data and interviewing informants while data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study illustrate that the implementation of the Regional Development Information system application at the Library and Archives Service of West Aceh Regency has not been optimal. This can be indicated that the behavior of Human Resources (HR) is not ready to face the application of the regional Government Information System application in every field due to the lack of socialization and training at the Regional Apparatus Work Unit level, resulting in delays in entering regional development planning data according to the time determined by Bappeda West Aceh. The implication of this research is that the local government is obliged to provide information on regional development and regional financial information which is managed in the Regional Government Information System directly integrated with the Central Government to provide information to the public regarding the administration of local government.

PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan Pemerintah Pusat dalam menerima informasi dari setiap pemerintahan daerah guna untuk memudahkan dalam pengumpulan data serta tersedianya database yang kuat untuk menampung keseluruhan data secara nasional dan sebagai dasar analisa perencanaan data pembangunan daerah yang terintegritas antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Fokus dalam penelitian ini pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat yang telah melaksanakan kebijakan dari pemerintah Daerah agar memudahkan penyampaian informasi perencanaan pembangunan daerah yang saling terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Pada hakikatnya pemerintah Daerah terdiri dari beberapa pemegang kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahannya yaitu seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota dan perangkat Daerah lainnya (Mursalim et al., 2019). Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal (391) ayat (1) tentang pemerintahan Daerah bahwa "pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi yang meliputi informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah" (Pemerintah et al., 2019). Dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 menteri dalam negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat dengan

(SIPD) seperti yang terdapat pada pasal (12) yang diterangkan bahwa "pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019) yang saling terhubung dengan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengarah pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dimana terciptanya suatu sistem data informasi sebagai pengambilan keputusan serta melibatkan para pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Ramdhani & Ramdhani, 2017; Salle, 2017; Suprianto, 2014). Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam membangun pola kerjasama yang berbasis data dan informasi dapat dilakukan dengan membentuk database daerah sehingga pemerintah pusat dapat melihat potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah sebagai pendukung dalam peningkatan sistem informasi dalam mengelola database daerah yang kuat sebagai dasar analisa perencanaan dan data pembangunan daerah secara nasional.

Adapun peraturan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan mengadopsi beberapa dasar utama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya ialah keterbukaan, rasa tanggung jawab dengan mengamati asas keadilan yang diperuntukkan bagi

masyarakat, keterlibatan, dan kepatuhan (Rahadi et al., 2020). Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah yaitu usia dan kebiasaan, dimana akan berpengaruh kepada kompetensi kinerja pegawai dalam meningkatkan mutu serta tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah (Sutanto et al., 2018). Seiring adanya perubahan reformasi birokrasi maka pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi sistem informasi manajemen yang canggih sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah secara cepat, tepat, dan transparansi (Wartini & Yasa, 2016). Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan strategi untuk merencanakan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah sehingga dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat SKPD maka dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih terarah (Ekaputra, 2021).

Salah satu mekanisme yang memudahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat dalam mengelola data pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan lainnya yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD adalah sistem informasi yang berbasis web dengan data waktu terkini dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Adapun SIPD dibangun untuk memudahkan SKPD dalam menyampaikan informasi berbentuk dokumentasi, administrasi serta mengelola data pembangunan daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan (Perencanaan et al., 2020). Penerapan aplikasi SIPD sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak media tahun 2020 yaitu dimulai dengan penyusunan APBD Tahun anggaran 2021. SIPD berfungsi sebagai media akuntabilitas publik yang menjadi transparansi informasi kepercayaan publik terhadap evaluasi kinerja pemerintah, program-program pembangunan, dan pencapaian pembangunan (Sudining, 2019).

Dengan melihat kondisi saat ini dimana APBD tahun anggaran 2021 adalah tahun pertama dalam penerapan SIPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa harus satu aplikasi saja yang beroperasi pada bidang subbagian program dan keuangan. SIPD diprogramkan oleh pemerintah pusat agar memudahkan Sumber Daya Manusia dalam pekerjaan akan tetapi dalam penerapan SIPD tidak berjalan dengan baik seperti halnya dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap SKPD dimana pelaksanaan APBD 2021 aplikasi yang digunakan sangat jauh berbeda dengan aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan APBD 2020, yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan mempunyai hambatan dalam penatausahaan keuangan daerah di aplikasi SIPD (Admin, 2021). Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelaksanaan tahun anggaran 2021. Namun permasalahan di setiap daerah belum sepenuhnya teratasi oleh karena itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) setiap pemerintah Daerah untuk lebih siap dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di tahun 2021.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang mana makna dari implementasi kebijakan itu sendiri merupakan suatu sistem yang dianggap sangat penting karena apabila suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan matang maka tidak akan terwujud untuk menjadi suatu tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan publik itu sendiri (Mursalim, 2017). Teori ini dipakai untuk mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah pusat dalam mempermudah penyampaian informasi dan pengumpulan data yang dirangkum dalam suatu aplikasi SIPD. Untuk mengukur keefektifan dari implementasi kebijakan, Edward III merekomendasikan empat isu pokok yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Setyawan & Srihardjono, 2016).

Berdasarkan uraian singkat diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat". Dengan berbagai penelusuran penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang mengangkat topik yang sama yaitu membahas tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah seperti yang dikemukakan oleh Ekaputra dalam artikelnya dengan judul "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk" menyimpulkan bahwa pemerintah daerah sudah menetapkan peraturan baru berupa penggunaan aplikasi dalam penyusunan dokumen RKPD dengan memakai aplikasi SIPD serta perubahan nomenklatur program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Nganjuk. Analisis tersebut menghasilkan bahwa dalam penerapan penggunaan aplikasi SIPD pada tahun pertamanya yaitu tidak efektif yang disebabkan oleh para pengguna tidak paham dalam penerapan aplikasi SIPD dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang sangat signifikan dalam pembuatan dokumen RKPD (Ekaputra, 2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan pada tulisan ini lebih berfokus kepada penerapan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pada SKPD terkhusus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat melalui teori Implementasi Kebijakan George Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi".

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku (Dr.farida Nugrahani, 2014) beliau mengatakan bahwa makna dari penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang mendeskripsikan fenomena secara mendalam yang berbentuk kata-kata secara lisan maupun tulisan. Dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif dengan adanya teori yang ada akan memunculkan teori atau aspirasi baru berdasarkan fenomena yang terjadi (Anggito & Setiawan, 2018).

Lokasi penelitian bertepatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Informan dalam penelitian ini ialah pejabat yang bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kebijakan pengaplikasian SIPD. Informannya

ialah Kepala dinas, Kepala Subbagian Program dan Keuangan beserta pejabat lainnya yang memegang akun SIPD. Dalam melaksanakan penelitian penulis melakukan analisa serta pengumpulan data dengan memberikan batasan-batasan (Eliza, 2021). Dengan demikian, batasan-batasan penelitian dapat difokuskan pada Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalam pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan wawancara secara mendalam, observasi dimana peneliti langsung melihat proses penerapan SIPD di instansi terkait tempat penelitian dilakukan, serta pendokumentasian DPA 2021 dan DPA 2020 dengan melihat perubahan nomenklatur program dan kegiatan. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menguraikan informasi sebelum menetapkan hasil pencapaian dari suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sangat bagus diterapkan seluruh Pemerintah Daerah Indonesia yang dibangun untuk mewujudkan layanan informasi perencanaan pembangunan daerah di tingkat SKPD yang saling terhubung dalam suatu sistem secara elektronik yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mengevaluasi pelayanan publik di Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang berbasis web (online) maka akan memudahkan bagi pengguna untuk mengakses data kapan dan dimana saja. Sehingga sistem informasi yang direncanakan secara tepat akan memberikan suatu kinerja dalam organisasi yang akurat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.

Dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah membangun pola kerjasama yang berbasis data dan informasi sehingga dapat memudahkan pemerintah pusat untuk mengontrol sejauh mana perencanaan pembangunan di setiap daerah. Selain itu, untuk mendukung penerapan aplikasi ini maka diperlukan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah, Sumber daya penunjang yang cukup serta jaringan untuk mengakses aplikasi berbasis web harus kuat. Namun untuk terwujudnya tujuan-tujuan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat harus siap dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan sumber daya penunjang seperti halnya sarana dan prasarana sebagai pendukung melengkapi fasilitas kantor untuk memudahkan pegawai dalam melakukan pekerjaan dapat terselesaikan. Oleh karena itu kedisiplinan pegawai dan sarana prasarana dapat mempengaruhi kinerja pegawai (Purwanti, 2013).

Adapun penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh dalam penerapannya terdapat beberapa kendala diantaranya ialah belum tersosialisasi dengan baik antara leader (Bappeda) dengan SKPK Aceh Barat terkait penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, kurangnya bimbingan pemerintahan pusat secara merata di setiap Pemerintahan Daerah, terkendala perubahan dalam penyusunan DPA dan RKA berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada

penentuan nama program dan kegiatan, sumber daya penunjang seperti sarana dan prasarana belum memadai, dan juga kurangnya server penatausahaan pada SIPD sehingga dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus beralih kembali ke aplikasi SIMDA Keuangan. Untuk mengatasi atas permasalahan diatas maka pihak pejabat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi pada zaman 4.0. Jika perangkat daerah tersebut tidak sigap maka akan sulit untuk berkembang dan Pemerintah Pusat akan sulit dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional.

Keberhasilan program kerja tentunya diawali dengan penyusunan perencanaan yang telah dilakukan secara matang dan terencana dengan mempunyai beberapa prinsip dasar yakni: teratur, tepat pada waktunya, efisien, dan tercapai tujuan. Dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan dapat dilakukan dengan pembuatan secara manual dan penginputan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berbasis web dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.



Gambar 1.1 Dashboard SIPD Kemendagri

Ruang lingkup SIPD terdiri dari informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya.

1. Informasi pembangunan daerah berfungsi mengelola data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan daerah. Data perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara elektronik dimana dalam pengelolaan data mempunyai prinsip yaitu satu data Indonesia. Tahapan-tahapan dalam mengelola data secara elektronik di tingkat SKPD dimulai data terlebih dahulu dipersiapkan, dikumpulkan data-data, pengisian data serta yang terakhir melakukan pemeriksaan data yang dikoordinasikan langsung pihak Bappeda Aceh Barat.
2. Informasi keuangan daerah berfungsi mengelola penganggaran daerah dan melaksanakan penatausahaan keuangan daerah, pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban, pelaksanaan keuangan daerah, barang milik daerah, dan informasi keuangan daerah lainnya. Informasi keuangan daerah sebagai evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik terdiri dari dokumen penyusunan KUA dan PPAS, pelaksanaan anggaran penatausahaan, pelaporan realisasi anggaran laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.

3. Informasi pemerintahan daerah lainnya berfungsi mengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), evaluasi Pemerintahan Daerah (Perda) yang berasal dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik.

Dokumen Penyusunan Perencanaan dan anggaran di tingkat SKPD Aceh Barat

Rencana penyusunan program dan kegiatan merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran bagi setiap bidang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tamasoleng (2015) bahwa anggaran menjadi alat utama urusan pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dengan mendeskripsikan serta menjabarkan anggaran terkait dengan kondisi pembangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, sekaligus bisa digunakan untuk memahami arah atau tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang sudah ditentukan, serta memudahkan berbagai jajaran Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan guna memahami serta menilai arah kebijakan atas program dan kegiatan yang akan dioperasionalkan baik tahunan hingga rentang waktu lima tahunan, yang harus dikelola secara tertib dan memenuhi asas-asas efisiensi dan akuntabel. Dalam penyusunan dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD mempunyai kegiatan yaitu penyiapan DPA SKPD dan penyediaan dana. Hasil akhir dari penyiapan DPA SKPD adalah suatu dokumen DPA SKPD dan Anggaran Kas sedangkan untuk penyediaan dana ialah dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD). Berikut proses penyusunan perencanaan di tingkat SKPD yang telah diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan SKPD Aceh Barat yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang dimulai dari terlaksananya tugas dan fungsi SKPD perencanaan pembangunan dari tahun 2017-2022. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Adapun penyusunan Renstra di tingkat SKPD dimaksud berpedoman pada pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan (Kompetitif, 2015).

2. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan dan program dan kegiatan dalam 1 tahun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Dokumen tersebut merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang disahkan oleh Kepala Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Dengan berpedoman kepada Rencana Kerja SKPD selanjutnya disusunlah Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Sebelum Rencana Kerja Anggaran SKPD disusun, Bappeda menyampaikan hasil kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) yang telah disahkan dalam nota kesepakatan yang dituangkan dalam surat edaran yang berisi tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

3. Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD)

Berdasarkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran, SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang telah disempurnakan oleh SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengelolaan keuangan (PPKD) (Manoppo et al., 2019). SKPD menyusun rencana kerja anggaran dengan pendekatan prestasi kinerja yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program. Adapun tujuan dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA) antara lain: (1). Untuk menyempurnakan rencana dana sesuai kebutuhan dari program dan kegiatan masing-masing bidang di masa yang akan datang (2). Dalam penggunaan dana program dan kegiatan dapat membatasi dalam jumlah dana yang digunakan (3). Mempermudah pengawasan dalam operasional terhadap perincian jenis sumber dana maupun jenis penggunaan dana. RKA (Rencana Kerja Anggaran) dipergunakan untuk menyusun anggaran yang diperuntukan apa saja seperti anggaran yang diberikan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat setiap tahun untuk digunakan sebagai berjalannya program dan kegiatan masing-masing bidang.

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

DPA SKPD adalah suatu dokumen yang memuat tentang kumpulan perolehan pendapatan dan belanja sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksanaan APBN (Publik, 2016). Dokumen ini disusun setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) disahkan oleh DPRK dan di Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat yang merupakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya mengelola kegiatan dengan berpedoman pada DPA SKPD dengan mempunyai rincian sebagai berikut: di bidang sekretariat mempunyai (1 program, 6 kegiatan, dan 22 sub kegiatan) di bidang pustaka mempunyai (1 program, 2 kegiatan, dan 8 sub kegiatan) sedangkan bidang arsip mempunyai (2 program, 4 kegiatan, dan 5 sub kegiatan). Anggaran yang dikelola pada tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ialah 4.166.384.419,00 di tahun 2021 terjadi perubahan signifikan antara aplikasi SIMDA dengan Aplikasi SIPD dengan total dana 3.973.483.306 seperti halnya perubahan nama program, kegiatan dan bertambahnya sub kegiatan di DPA 2021. Selain itu, adanya perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara DPA SKPD 2020 dengan DPA 2021 seperti halnya di tahun 2020 menggunakan belanja tidak langsung dan belanja langsung kini sudah tidak menggunakan struktur APBD 2020 yang dikelola dalam aplikasi SIMDA Keuangan melainkan di tahun anggaran anggaran 2021 sudah pergantian menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dikelola dalam aplikasi SIPD.

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi aplikasi SIPD maka peneliti menggunakan fokus penelitian pada teori implementasi kebijakan menurut (George Edward III) sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dapat dilakukan antara kepala dinas dan staf bawahan jajarannya guna mencapai tujuan yang telah dirundingkan serta mencapai target program pemerintah sesuai yang diharapkan. Dari hasil penelitian dan berbagai sumber yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan bahwa untuk terwujudnya implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat salah satunya adalah kelancaran komunikasi antara eselon II, eselon III, dan eselon IV (Kepala dinas, Sekretaris, Kepala bidang, Kepala Subbagian dan setiap Kepala Seksi). Untuk mewujudkan informasi dapat dilakukan tiga dasar yaitu tepat objeknya, tepat waktunya, dan tepat hasil daripada kualitasnya untuk mencapai semua itu maka diperlukan kerjasama antara pimpinan dan bawahan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menindaklanjuti perihal sosialisasi dengan pemerintah pusat dan seluruh SKPD Aceh Barat menghadiri dan dibimbing dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tujuan dari Kemendagri membangun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai aplikasi yang terintegrasi, mempermudah dalam mengakses data, dan menciptakan sebuah sistem yang dapat memberikan gambaran yang mempunyai akun dapat mengambil keputusan (Fitriadi, 2020). Hal ini bermaksud untuk mengupayakan memudahkan birokrasi dan penggunaan anggaran negara agar lebih cepat dan praktis. Sehingga dalam melakukan pengadaan atau pemeliharaan dapat ditangani oleh Sistem Informasi pemerintahan Daerah yang berbasis web. Dengan demikian untuk mencapai kebijakan pemerintah pusat maka para pejabat dinas membentuk forum diskusi terkait penggunaan aplikasi SIPD guna membahas lebih lanjut pengelolaan anggaran tahun 2021 program dan kegiatan di setiap bidang.

2. Sumberdaya

Kemajuan suatu program dapat didukung oleh Sumber daya yang memadai baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia telah memenuhi dan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Namun dalam pengoperasiannya sebagian para pejabat dinas memiliki potensi dan kemampuan untuk menghadapi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adapun sebagian lainnya kewalahan terhadap penginputan data dimana aplikasi SIPD merupakan hal yang baru dan terdapat beberapa kesulitan dalam penginputan data serta sulit memilih nama program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat berbeda jauh dengan aplikasi sebelumnya. Dengan adanya sumber daya finansial dapat membantu proses berjalannya birokrasi dengan anggaran senilai 1 Miliar yang dipergunakan untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun sumber daya sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat atau media untuk menjalankan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah seperti halnya jaringan wifi, komputer, printer, dan alat penunjang

lainnya kurang memadai sehingga dalam penginputan data perencanaan SKPD sulit dilakukan dalam bekerja.

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku petugas pelaksana dapat dilihat dari tanggung jawab atau komitmen dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa para petugas memiliki rasa tanggung jawab, keinginan, dan kecenderungan dalam melaksanakan kebijakan walaupun masih dibutuhkan perhatian lebih dari pelaksana tugas dan fungsi dinas. Tolak ukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari pelaksana kebijakan. Dimulai dari implementor yang memiliki sikap jujur, dan berkomitmen dalam menjalankan tanggung jawab atas terlaksananya kebijakan maka peluang untuk memajukan suatu organisasi sangatlah bagus. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan sudah terlaksana dengan baik para pejabat di masing-masing bidang saling membahu untuk menjalankan tugas dan kewajiban terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang.

4. Struktur Birokrasi

Dalam menjalankan menjalankan suatu program dan kegiatan diperlukan kerjasama dalam mewujudkan koordinasi yang jelas dan teratur. Dalam hal ini para pejabat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat mempunyai tanggung jawab terhadap terlaksananya kebijakan pemerintah pusat berupa aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Berikut susunan organisasi dalam struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Perpustakaan terdiri dari:
 1. Seksi Layanan dan Informasi Perpustakaan
 2. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka
 3. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Minat Baca
- d. Bidang Kearsipan terdiri dari:
 1. Seksi Pengolahan dan Akuisisi Kearsipan
 2. Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemeliharaan Kearsipan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- f. UPTD

Faktor-faktor Penghambat Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Penggunaan aplikasi SIPD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat ternyata masih banyak terdapat hambatan dalam penggunaannya terhadap penginputan dokumen penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi antara pemangku kebijakan dengan pelaksana kebijakan sehingga dalam melaksanakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah belum optimal.
2. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap perubahan nomenklatur kegiatan dan cara penginputan program, kegiatan, dan sub kegiatan di aplikasi SIPD.

3. Terkendala pada jaringan server yang sering error pada saat penginputan dokumen-dokumen membutuhkan waktu yang lama sehingga sulit mengakses aplikasi SIPD yang membuat proses penginputan data ke aplikasi menjadi terhambat dikarenakan seluruh Indonesia mengakses aplikasi yang berbentuk web.
4. SDM/pegawai/pengguna aplikasi belum terbiasa dalam penggunaan aplikasi SIPD dikarenakan belum paham terkait perubahan-perubahan nomenklatur program kegiatan yang berubah secara keseluruhan. Sehingga pengguna akun SIPD sulit untuk memahami atas perubahan signifikan yang diakibatkan oleh *user interface e-planning*. Apabila SDM telah menginput program dan kegiatan maka secara langsung akun pengguna SIPD dan waktu pada saat penginputan akan terekam.
5. Batasan waktu penutupan pengusulan sedikit apabila usulan program dan kegiatan yang belum selesai maka akan secara otomatis terkunci. Dengan demikian, apabila sistem sudah ditutup maka usulan program dan kegiatan tidak bisa diisi lagi. Sebagaimana pengusulan waktu telah diatur dalam perundang-undang.
6. Aplikasi SIPD terhambat dikarenakan kurangnya pemahaman sistem pada tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan bagian penganggaran serta kurangnya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang dalam melakukan pekerjaan seperti komputer, printer, mesin fotocopy, dan alat penunjang lainnya.

Upaya mengatasi terjadinya penghambatan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Cara untuk menetralkan atas permasalahan-permasalahan sesudah diterapkan pemakaian aplikasi SIPD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat akan dipaparkan dibawah ini:

1. Mengadakan sosialisasi oleh Pemerintah Pusat diselenggarakan beberapa kali agar setiap SKPD Aceh Barat terkhususnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat paham dan mengerti tentang penggunaan aplikasi SIPD serta dapat di bina dan diberikan pemahaman agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengatasi permasalahan server Pemerintahan Daerah telah menyurati dan menanyakan kepada Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi setiap SKPD Aceh Barat dan dari server pemerintah pusat masih lemah dikarenakan alat bantu jaringan masih kurang sedangkan pemakai aplikasi SIPD digunakan oleh seluruh lingkungan SKPD Aceh Barat. Atas Permasalahan tersebut Pemerintah Pusat akan menangani permasalahan-permasalahan tersebut.
2. Dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah seluruh SKPD diperlukan pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi dalam penginputan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 terkait tentang klasifikasi, kodefikasi, dan

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pihak pendamping dari Bappeda Aceh Barat kepada setiap SKPD yang memerlukan penjelasan dari setiap permasalahan-permasalahan mengenai penggunaan aplikasi SIPD dengan cara memberikan pelayanan publik berupa penjelasan tentang pelaksanaan aplikasi SIPD dengan memberikan jawaban atas pertanyaan seputar aplikasi SIPD. Dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang penggunaan aplikasi SIPD terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan maka dalam pengusulan program dan kegiatan SKPD dapat menjadi hal yang diprioritaskan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD Aceh Barat.

3. Dibutuhkan informasi lebih lanjut dari pemangku kebijakan kepada setiap SKPD bahwa dalam pengusulan program dan kegiatan dikumpulkan tepat waktu untuk mencapai perwujudan *good governance* sehingga dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat diterima oleh operator Bappeda Aceh Barat.
4. Dalam pembuatan dokumen perencanaan pembangunan daerah di seluruh pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIPD yang dikeluarkan surat edaran dari Kemendagri sedangkan dalam pembuatan dokumen penganggaran dilakukan dengan aplikasi SIMDA Keuangan secara paralel. Diperlukan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM setiap SKPD dalam pembuatan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan mudah atas pemahaman yang telah diberikan.
5. Untuk mempermudah dalam bekerja para pengguna akun aplikasi SIPD memerlukan komputer untuk menginput data. Oleh Karena itu pada tahun 2022 diperlukan pengadaan komputer dan alat penunjang lainnya sebagai alat pembantu dalam proses bekerja para pengguna akun SIPD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.

Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan setelah diterapkan aplikasi SIPD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman, sosialisasi, dan pelatihan dalam penerapan aplikasi SIPD yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih adaptif, responsive, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Tujuan pemerintah membangun aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi setiap SKPD yang terintegrasi sistem sebelumnya yaitu aplikasi perencanaan dan aplikasi penganggaran. Dengan adanya rekomendasi dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dimana SDM memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan penggunaan aplikasi perencanaan menjadi aplikasi SIPD. Dengan ter seragamnya aplikasi keuangan daerah di seluruh Indonesia akan mempermudah pemerintah pusat dalam mengontrol kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaplikasian SIPD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat belum optimal karena belum sesuai dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang mana pada bidang keuangan wajib menggunakan satu aplikasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala salah satunya pada bagian penatausahaan yang mana masih menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan dan dalam pembuatan dokumen perencanaan menggunakan aplikasi SIPD.
2. Hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terdapat beberapa hambatan di dalamnya seperti belum tersosialisasi dengan baik antara Bappeda dengan setiap SKPD, perilaku SDM tidak berkompeten, terkendala pada jaringan server yang sering eror sehingga dalam batasan pengumpulan dokumen-dokumen sedikit, sarana dan prasarana belum memadai.
3. Cara mengatasi kendala selepas dilaksanakan aplikasi SIPD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat ialah dengan melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi mengenai sulitnya mengakses aplikasi SIPD yang terintegrasi dari Pemerintah Pusat yang harus segera ditangani. Memberikan solusi dan pelatihan supaya perilaku SDM siap menghadapi kebijakan yang dikeluarkan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 serta memberikan pengarahan dalam pembuatan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggaran yang dilaksanakan pada aplikasi SIPD dan SIMDA Keuangan secara paralel.

REFERENSI

- Admin, O. (2021). *Pelaksanaan SIPD dan SIMDA Keuangan Secara Paralel*. RESMI BKAD KABUPATEN KULON PROGO.Com. <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1527/pelaksanaan-sipd-dan-simda-keuangan-secara-paralel>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.); Cetakan Pe). CV Jejak.
- Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Dasar* (Vol. 1, Issue 1). Cakra Books. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.io-srjournals.org>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6. <http://dSPACE.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf>
- Eliza, A. (2021). *Journal of Social and Policy Issues Analisa Perlindungan Hak Pekerja Perempuan pada Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja*. 2.
- Fitriadi. (2020). *Sosialisasi Permendagri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di lingkungan APIP Kabupaten Aceh Barat*. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.Com. <https://inspektorat.acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/sosialisasi-permendagri-no-70-tentang-sistem-informasi-pemerintahan-daerah-sipd-di-lingkungan-apip-kabupaten-aceh-barat>
- Kompetitif, B. D. A. N. (2015). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.1 Tahun 2015 MENANALISIS RENCANA STRATEGIS MENUJU LEMBAGA PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN KOMPETITIF* Mohamad Muspawi 1. 15(1), 87–90.
- Manoppo, E. S., Walandouw, S. K., Penyusunan, A., Kerja, R., Pada, A. R., Pengelolaan, P., Dan, K., Daerah, A., Ekonomi, F., Manajemen, J., & Ratulangi, U. S. (2019). Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Rka-Skpd) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4), 4798–4807. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.25432>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Nomor 65(879), 2004–2006.
- MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah* (pp. 1–2300).
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung Siti Widharetno Mursalim. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14, 126–138. Bandung Siti Widharetno Mursalim. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14, 126–138.
- Mursalim, S. W., Hasibuan, A., Sulaiman, oris kianto, Mulyanie, E., Husna, R. A., Apriandi, I., Maiti, Bidinger, Suryana, A., Iskandar, A., Hernawan, D., Dengo, S., Rahmadanita, A., Santoso, E. B., Wasistiono, S., Marisa, H., Andree, Sarbini, A., Kusuma, A. R., ... Theory, P. (2019). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2). <https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buku-2.-masterplan-smart-city-kota-bogor.pdf>
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Daerah, P. K., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2019). *Lembaran Negara*. 42.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Perencanaan, B., Daerah, P., Manado, K., Nadya, C., & Wurara, C. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–13.
- Publik, A. (2016). BAGIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI I Made Agus Suteja 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Email : sutejamades@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Un. 1, 1–28.
- Purwanti, S. (2013). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Guru Dan Pegawai Di SMA Bakti Sejahtera Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Administrasi Negara*, 1(1). http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/jurnal_ajeng_genap_03-04-13-

12-01-42).pdf [accessed: November 7, 2013]

- Rahadi, D. R., Marbun, S. O., Bhakti, S. T., Presiden, U., & Mochamadmuslihsietrihbhaktiacid, E. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, February*, 1-7.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>
- Setyawan, D., & Srihardjono, B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125-133. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- Sudianing, N. K. (2019). Staf Pengajar Universitas Panji Sakti Singaraja Staf Pengajar Universitas Ganesha Singaraja I. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 112-133.
- Suprianto, E. (2014). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. *Ekobis.....*, 15(1), 17-30. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ekobis/article/viewFile/552/454>
- Sutanto, S., Ghozali, I., & Handayani, R. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan Dan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Dalam Perspektif the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (Utaut 2) Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(1), 37. <https://doi.org/10.14710/jaa.15.1.37-68>
- Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 3(1).
- Wartini, N. N., & Yasa, I. G. W. M. (2016). (SIKD) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Sejalan dengan bergulirnya otonomi maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan asas-asas pemerintahan dengan prinsip demokras. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas*, 5, 1411-1438.